

# INDIKATOR EKONOMI KOTA PALU 2016





# INDIKATOR EKONOMI KOTA PALU 2016



# INDIKATOR EKONOMI KOTA PALU 2016

**No. Katalog** : 9201001.7271  
**ISBN** :  
**No. Publikasi** : 72710.1715  
**Ukuran Buku** : 21 cm x 15 cm  
**Jumlah Halaman** : vi+44 Halaman

**Naskah** :  
Ayub Qolbani, SST

**Penyunting** :  
Widya Kartika, SST

**Gambar Kulit** :  
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

**Diterbitkan Oleh** :  
Badan Pusat Statistik Kota Palu

**Dicetak Oleh** :  
Percetakan "RIO" Palu

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



## KATA PENGANTAR

BPS Kota Palu telah berhasil menyelesaikan publikasi **Indikator Ekonomi Kota Palu 2016**. Publikasi ini menyajikan data-data statistik dalam bentuk tabel dan grafik dengan sedikit penjelasan sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada kalangan pengguna data terutama data-data perekonomian di Kota Palu. Informasi dalam buku ini dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi maupun sebagai rujukan bagi para akademisi.

Disadari sepenuhnya bahwa publikasi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dari para konsumen data.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembuatan sampai dengan terbitnya publikasi ini.

Palu, Desember 2017

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PALU**

Ir. Sutrisno S. Abusungut, M. Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI</b> .....	1
1.1 Indeks Harga Kosumen.....	1
1.2 Laju Inflasi.....	6
<b>BAB II KEUANGAN PEMERINTAH DAN PERBANKAN</b> .....	15
2.1 Keuangan Pemerintah.....	15
2.2 Perbankan.....	19
<b>BAB III TRANSPORTASI, KOMUNIKASI, DAN PARIWISATA</b> .....	27
3.1 Transportasi.....	27
3.2 Komunikasi.....	32
3.3 Pariwisata.....	33
<b>BAB IV PDRB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b> .....	39
4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu.....	39
4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu.....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palu Menurut Kelompok Tahun .....	2
Tabel 2. Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Tahun 2016 .....	11
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Otonomi Kota Palu, 2015-2016 (juta rupiah) .....	16
Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Daerah Otonomi Kota Palu, 2015-2016 (juta rupiah) .....	18
Tabel 5. Posisi Kredit Investasi Bank Pemerintah menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016 .....	22
Tabel 6. Posisi Kredit Investasi Bank Swasta menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016 (juta rupiah) .....	24
Tabel 7. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2016 .....	29
Tabel 8. Panjang Jalan menurut Status Jalan Tahun 2016 .....	30
Tabel 10. Arus Lalu Lintas Pesawat Udara dan Penumpang di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, 2011-2015 .....	32
Tabel 11. Banyaknya Pelanggan dan Sarana Telekomunikasi menurut STO dan Jenis Penggunaan Tahun 2015 .....	33
Tabel 12. Banyaknya Hotel Bintang dan Akomodasi Lain di Kota Palu, 2012-2015 .....	35
Tabel 13. Banyaknya Tamu Asing dan Tamu Dalam Negeri yang Menginap di Hotel dan usaha Akomodasi, Januari-Desember 2016 .....	37
Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2016 (juta rupiah) .....	40
Tabel 15. Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Persen) .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Laju Inflasi Kota Palu, 2012-2016.....	7
Gambar 2.	Laju Inflasi Kota Palu januari-Desember 2016.....	8
Gambar 3.	Inflasi Kota Palu menurut Kelompok Tahun 2016.....	10
Gambar 4.	Persentase Penerimaan Daerah Kota Palu,2016 ...	17
Gambar 5.	Jumlah Bank di Kota Palu, 2016 .....	20
Gambar 6.	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel dan Akomodasi di Kota Palu, 2012-2016 .....	36
Gambar 7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017.....	43

# BAB I

## INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI

### 1.1. Indeks Harga Konsumen

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami perubahan naik dan turun yang dinamis. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memelihara kestabilan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kestabilan ekonomi ini menyangkut dari segi kestabilan tingkat harga dan inflasi yang tinggi.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditampilkan dalam publikasi ini terdiri atas tujuh (7) kelompok kebutuhan primer yang berupa bahan makanan, makanan

jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Tabel berikut ini menyajikan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palu tiap bulan selama tahun 2016:

Tabel 1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palu Menurut Kelompok Tahun 2016

Bulan	Bahan Makanan	Kelompok		
		Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	128,31	136,92	117,99	106,14
Februari	126,05	137,23	117,24	106,64
Maret	128,48	137,33	116,03	106,90
April	127,33	137,58	116,87	106,88
Mei	130,10	137,99	117,95	106,79
Juni	129,59	138,82	118,69	107,09
Juli	129,68	139,01	118,04	108,17
Agustus	127,80	138,99	118,22	108,29
September	129,20	138,83	118,19	108,28
Oktober	123,96	139,99	118,40	108,66
November	127,42	140,34	118,37	109,34
Desember	131,65	140,68	118,53	109,56

Tabel 1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palu Menurut Kelompok Tahun 2016 (lanjutan)

Bulan	Kesehatan	Kelompok			Umum
		Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Januari	114,45	121,68	126,06	124,71	
Februari	114,91	121,72	124,69	123,95	
Maret	115,10	121,76	124,63	124,42	
April	115,23	121,79	122,20	123,76	
Mei	115,42	121,82	124,03	124,75	
Juni	116,48	121,77	126,55	125,53	
Juli	116,77	125,03	126,90	126,02	
Agustus	116,80	125,03	125,86	125,50	
September	117,45	127,88	127,44	126,24	
Oktober	117,52	127,88	124,88	125,04	
November	118,19	127,87	123,71	125,65	
Desember	118,34	127,25	126,48	127,09	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

IHK merupakan sebuah indeks yang menggambarkan perkembangan harga suatu barang tertentu yang berlaku pada periode tertentu dibandingkan dengan harga barang tersebut pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan dalam IHK biasanya didapatkan pada saat kegiatan Survei Biaya Hidup (SBH). BPS terakhir kali melakukan SBH yaitu pada tahun 2012, maka dari itu tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan IHK ini adalah tahun 2012.

Cara perhitungan IHK menggunakan metode Indeks Laspyers. IHK dapat menunjukkan perubahan harga dengan asumsi volume penggunaan barang tetap, sehingga satu-satunya penyumbang perubahan IHK adalah dari perubahan harga barang itu sendiri dibandingkan harga pada tahun dasar.

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa IHK makanan dan minuman jadi (termasuk rokok dan tembakau) mengalami kenaikan tertinggi dari tahun 2012 sampai 2016 ini. IHK barang tersebut mencapai 140,68 pada Desember 2016 atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kenaikan makanan dan minuman jadi (termasuk rokok dan tembakau) mencapai 40,68 persen dibandingkan

kondisi pada tahun 2012. Sementara itu, kelompok sandang mempunyai IHK paling rendah dibandingkan kelompok lain, yaitu hanya 109,56 pada Desember 2016.

Kelompok Bahan Makanan mengalami fluktuasi yang cukup cepat. IHK kelompok ini sebesar 128,31 pada Januari dan mengalami naik turun pada bulan berikutnya. IHK bahan makanan mencapai angka 130,10 pada Mei dan kembali turun naik secara fluktuatif pada bulan berikutnya. Pada bulan Juli (periode Lebaran) IHK kembali naik ke angka 129,68 dan kemudian stabil sampai bulan November. Pada akhir tahun yang bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru, IHK kelompok bahan makanan mencapai nilai tertinggi selama tahun 2016 yaitu sebesar 131,65. Kelompok ini menarik untuk diamati dibandingkan kelompok lain karena perubahan harganya sangat cepat.

## 1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi ini berkaitan dengan mekanisme pasar yang salah satunya disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat. Inflasi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga. Angka inflasi didapatkan dari penghitungan perubahan IHK. Apabila terjadi kenaikan IHK maka disebut inflasi, sementara apabila terjadi penurunan IHK maka disebut dengan deflasi.

Kota Palu sebagai daerah utama penggerak ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami fenomena inflasi. Secara umum, angka inflasi Kota Palu pada tahun 2016 adalah sebesar 1,52 persen. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan inflasi secara nasional yaitu sebesar 3,02 persen. Artinya, perubahan tingkat harga di Kota Palu lebih rendah dibandingkan perubahan tingkat harga secara nasional selama tahun 2016. Adapun perkembangan inflasi Kota Palu selama lima (5) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Laju Inflasi Kota Palu, 2012-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Kota Palu mengalami fenomena inflasi yang besarnya cukup berfluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 inflasi Kota Palu sebesar 5,87 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 7,57 persen dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 8,85 persen. Pada kurun dua (2) tahun terakhir angka inflasi dapat ditekan ke angka 4,17 persen pada tahun 2015 dan 1,52 persen pada tahun 2016.

Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dapat mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang yang berarti bahwa semakin rendah daya belinya.

Inflasi tertinggi terjadi di bulan Desember sebesar 1,15 persen. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 0,95 persen. Adapun perkembangan inflasi selama tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

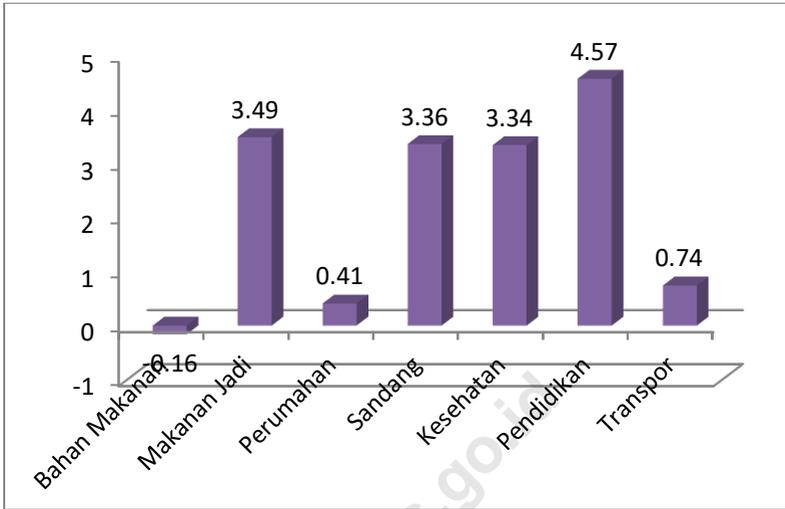


Gambar 2. Laju Inflasi Kota Palu Januari-Desember 2016  
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Pada triwulan pertama tahun 2016, Kota Palu mengalami deflasi 0,41 persen dan 0,61 persen, kemudian inflasi sebesar 0,38 persen pada Maret. Pada triwulan kedua

yang bertepatan dengan tahun ajaran baru, puasa dan lebaran, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,8 persen, 0,63 persen dan 0,39 persen. Pada triwulan ketiga, fenomena inflasi terjadi pada September yang bertepatan dengan Hari Raya Qurban (Idul Adha). Sementara itu, pada triwulan terakhir angka inflasi menanjak ke angka 0,49 persen dan 1,15 persen yang bertepatan dengan Hari Natal dan menyambut Tahun Baru.

Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga mengalami inflasi tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,57 persen. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau menempati inflasi tertinggi kedua sebesar 3,49 persen, diikuti Sandang (3,36 persen) dan Kesehatan (3,34 persen). Sementara itu, kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan serta Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,74 persen dan 0,41 persen. Kelompok Bahan Makanan justru mengalami deflasi sebesar -0,16 persen pada tahun 2016 ini. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Tahun 2016  
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2. Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Tahun 2016

Bulan	Bahan Makanan	Kelompok		
		Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	-2,99	0,77	-0,04	0,18
Februari	-1,76	0,23	-0,64	0,47
Maret	1,93	0,07	-0,18	0,24
April	-0,90	0,18	-0,14	-0,02
Mei	2,18	0,30	0,07	-0,08
Juni	-0,39	0,60	0,63	0,28
Juli	0,07	0,14	0,30	1,01
Agustus	-1,45	-0,01	0,15	0,11
September	1,10	-0,12	-0,03	-0,01
Oktober	-4,06	0,84	0,18	0,35
November	2,79	0,25	-0,03	0,63
Desember	3,32	0,24	0,14	0,20

Tabel 2. Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Tahun 2016  
(lanjutan)

Bulan	Kesehatan	Kelompok		
		Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Umum
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	-0,02	0,04	0,29	-0,41
Februari	0,40	0,03	-0,19	-0,61
Maret	0,17	0,03	-0,05	0,38
April	0,11	0,02	-1,95	-0,53
Mei	0,16	0,02	1,50	0,80
Juni	0,92	-0,04	2,03	0,63
Juli	0,25	2,68	0,28	0,39
Agustus	0,03	0,00	-0,82	-0,41
September	0,56	2,28	1,26	0,59
Oktober	0,06	0,00	-2,01	-0,95
November	0,57	-0,01	-0,94	0,49
Desember	0,13	-0,48	2,24	1,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Inflasi menunjukkan perubahan tingkat harga atau Indeks Harga Konsumen (IHK). Nilai inflasi Kelompok Bahan Makanan bulan Maret didapatkan dari nilai IHK Maret dibagi dengan IHK Februari. Begitu juga seterusnya untuk kelompok lain dan pada bulan-bulan berikutnya. Maka dari itu, inflasi pada bulan itu menunjukkan perubahan tingkat harga bulan itu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi ini dalam ilmu statistik disebut dengan inflasi *month to month (mtm)*.

Selain inflasi *month to month*, ada juga istilah lain dari inflasi yang disebut dengan inflasi *year on year (yoy)*. Inflasi ini menggambarkan perbandingan tingkat harga pada bulan tertentu dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu juga ada inflasi tahunan yang menggambarkan nilai kumulatif inflasi bulanan yang menggambarkan kondisi inflasi pada satu tahun kalender.

<https://palukota.bps.go.id>

## **BAB II**

### **KEUANGAN PEMERINTAH DAN PERBANKAN**

#### **2.1. Keuangan Pemerintah Daerah**

Biaya pembangunan terdiri dari dua sumber yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka otonomi daerah, sumber dana pembangunan dititikberatkan pada APBD. Untuk meningkatkan APBD, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, antara lain:

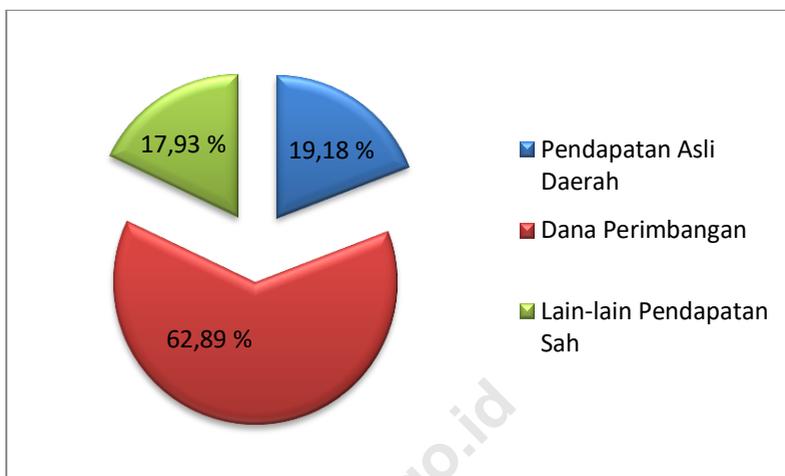
- a. Rendahnya pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- b. Rendahnya laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Rendahnya peranan koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah.

Realisasi penerimaan daerah otonom Kota Palu tahun 2016 mencapai 1,39 triliun rupiah meningkat sebesar 67 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Otonomi Kota Palu, 2015-2016 (juta rupiah)

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)
<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>253 977</b>	<b>284 555</b>
a. Pajak Daerah	88 273	102 895
b. Retribusi Daerah	16 011	15 383
c. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 315	4 014
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148 378	162 263
<b>2. Dana Perimbangan</b>	<b>832 972</b>	<b>1 035 431</b>
a. Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak	26 142	30 718
b. Dana Alokasi Umum	652 407	683 609
c. Dana Alokasi Khusus	154 423	321 104
<b>3. Lain-lain Pendapatan Sah</b>	<b>233 456</b>	<b>71 983</b>
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1 324 406</b>	<b>1 391 969</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017



Gambar 4. Persentase Penerimaan Daerah Kota Palu, 2016  
 Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Realisasi pengeluaran pemerintah daerah otonom Kota Palu tahun 2016 sebesar 1,381 triliun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,309 triliun rupiah. Pengeluaran tersebut terbagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk belanja langsung sebesar 709,21 miliar rupiah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Informasi lebih rinci disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Daerah Otonomi Kota Palu, 2015-2016 (juta rupiah)

<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>684 110</b>	<b>671 958</b>
a. Belanja Pegawai	630 931	651 143
b. Belanja Bunga	7 061	4 974
c. Belanja Hibah	36 933	6 744
d. Belanja Bantuan Sosial	7 541	7 717
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	538	612
f. Belanja Tidak Terduga	1 107	768
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>625 112</b>	<b>709 214</b>
a. Belanja Pegawai	60 471	55 455
b. Belanja Barang dan Jasa	319 976	366 622
c. Belanja Modal	244 665	287 137
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1 309 222</b>	<b>1 381 172</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

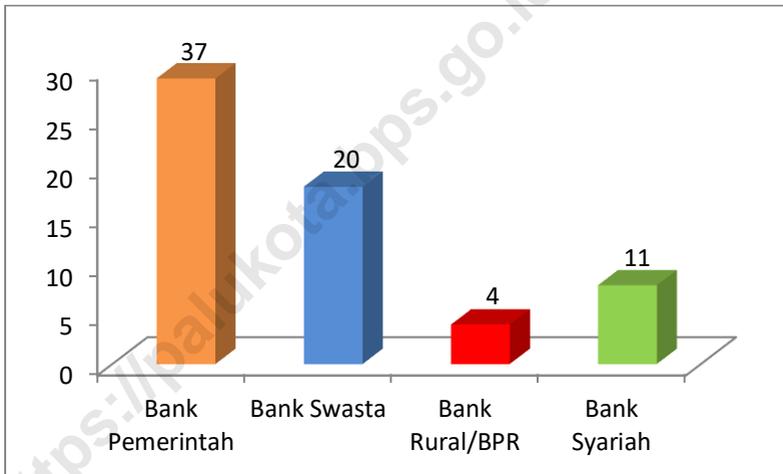
## 2.1. Perbankan

Perkembangan perbankan di Kota Palu tidak terlepas dari perkembangan perbankan secara nasional. Sektor moneter dan perbankan secara umum menunjukkan perkembangan yang mulai membaik pasca gejala ekonomi yang timbul akibat krisis moneter tahun 1997-1998. Suku bunga secara bertahap telah menunjukkan penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam negeri, seperti inflasi, menurunnya mata uang dolar terhadap rupiah, kondisi perbankan serta langkah dan tindakan otoritas moneter. Perkembangan ini sejalan dengan kebijaksanaan Bank Indonesia untuk mengupayakan nilai rupiah tetap stabil supaya kondisi perekonomian dapat berjalan normal kembali melalui penurunan suku bunga secara bertahap.

Sejalan dengan perekonomian yang mulai stabil, secara bertahap jumlah bank mulai bertambah baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Dalam rangka penyehatan kondisi perbankan nasional, pemerintah diharapkan terus melanjutkan langkah rekapitalisasi sebagai salah satu upaya restrukturisasi di bidang

perbankan sebagai tonggak yang cukup penting dalam agenda pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan restrukturisasi perbankan ditunjukkan melalui langkah-langkah penyehatan bank yang difokuskan pada upaya pemulihan kepercayaan dan peningkatan modal, sedangkan tahapan operasional rekapitalisasi dilakukan melalui pemeriksaan kondisi keuangan.



Gambar 5. Jumlah Bank di Kota Palu, 2016

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Gambar 5 menunjukkan jumlah Bank di Kota Palu pada tahun 2016. Bank Pemerintah masih mendominasi perbankan di Kota Palu dengan jumlah 37 bank, baik yang berstatus kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, maupun kantor kas. Contoh yang termasuk ke

dalam kelompok bank ini adalah Bank BRI, Bank BRI dan Bank Mandiri. Kelompok Bank Pemerintah tersebut masih mendominasi struktur jasa keuangan perbankan di Kota Palu. Di luar bank plat merah, juga terdapat 20 bank swasta, 4 bank rural (Bank Perkreditan Rakyat) dan 11 Bank Syariah seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan sebagainya yang mulai berkembang beberapa waktu terakhir ini. Bank-bank ini memberi alternatif para pengguna jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Bank berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui kredit usaha. Bank juga memiliki andil terhadap tumbuhnya perekonomian. Melalui jumlah uang yang beredar dapat diketahui pertumbuhan ekonomi dari sisi moneter. Namun, lebih konkritnya sektor perbankan dapat membantu menggerakkan perekonomian khususnya di Kota Palu. Andil sektor ini yaitu melalui kredit-kredit yang disalurkan kepada para pengusaha yang bergerak di berbagai sektor. Maka dari itu, kredit yang disalurkan perbankan dapat membantu pertumbuhan ekonomi secara riil. Posisi kredit

yang disalurkan Bank Pemerintah menurut Sektor Ekonomi periode dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Posisi Kredit Investasi Bank Pemerintah menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016 (juta rupiah)

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kredit</b>
(1)	(2)
1. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	83 701
2. Perikanan	2 349
3. Pertambangan dan Penggalian	24 719
4. Industri Pengolahan	10 111
5. Listrik, Gas & Air	2 006
6. Konstruksi	184 172
7. Perdagangan Besar dan Eceran	252 820
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	111 569
9. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	9 539
10. Perantara Keuangan	951
11. Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahan	16 636

12. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	-
13. Jasa Pendidikan	1 223
14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6 230
15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	27 723
16. Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga	5 929
17. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	-
18. Kegiatan yang belum jelas batasannya	-
19. Penerima kredit bukan lapangan usaha	-
<b>Jumlah</b>	<b>734 679</b>

Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah

Tabel 6. Posisi Kredit Investasi Bank Swasta menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016 (juta rupiah)

Sektor Ekonomi (1)	Kredit (2)
1. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	23 077
2. Perikanan	8 364
3. Pertambangan dan Penggalian	1 648
4. Industri Pengolahan	19 355
5. Listrik, Gas & Air	-
6. Konstruksi	24 332
7. Perdagangan Besar dan Eceran	270 372
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58 879
9. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	10 570
10. Perantara Keuangan	43 593
11. Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	20 835
12. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	-

---

13. Jasa Pendidikan	5 348
14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3 670
15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	38 592
16. Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga	1 285
17. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	-
18. Kegiatan yang belum jelas batasannya	1 160
19. Penerima kredit bukan lapangan usaha	-
<hr/>	
<b>Jumlah</b>	<b>526 080</b>

---

Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah

<https://palukota.bps.go.id>

## **BAB III**

### **TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & PARIWISATA**

Perkembangan perekonomian yang cukup tinggi diiringi dengan tingkat mobilitas penduduk maka peranan perhubungan sangat dominan dalam merangsang dan menunjang pertumbuhan produksi barang dan jasa yang merupakan penghasil devisa negara. Pemerintah Kota Palu mulai gencar mempromosikan pariwisata salah satunya melalui *event* “Palu Nomoni”. Festival ini bertujuan untuk menarik minat para turis/wisatawan untuk berkunjung ke Kota Palu. Selain itu, pada bulan Maret juga terdapat satu fenomena besar yaitu Gerhana Matahari Total (GMT). Fenomena alam ini tentu saja menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Palu. Maka dari itu, kegiatan semacam ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Tidak hanya itu, pariwisata juga berdampak pada industri kreatif maupun mikro kecil di sekitarnya. Untuk menunjang itu semua, pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang memadai.

#### **3.1. Transportasi**

Jalan raya merupakan salah satu sarana penting dalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis

yang dimilikinya, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lain. Jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Data panjang jalan disajikan menurut provinsi, kewenangan pembinaan, jenis permukaan serta kondisi jalan. Pemerintah Kota Palu selalu berupaya memperbaiki kondisi jalan dan menambah jalan-jalan baru agar kelancaran lalu lintas tetap terjamin.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat, Pemerintah Kota Palu telah membangun jalan sepanjang 851,26 km. Dari panjang jalan yang dibangun Pemerintah Kota Palu tersebut, kondisi jalan pada tahun 2016 terdapat 305,19 km dalam kondisi baik, dan 104,56 km dalam kondisi rusak berat, dan sisanya dalam kondisi sedang dan rusak ringan.

Tabel 7. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2016

Kondisi Jalan	Status Jalan				Jumlah
	Negara	Provinsi	Kota	Non Status	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Baik	-	-	332,70	-	332,70
b. Sedang	-	-	257,65	-	257,65
c. Rusak	-	-	157,04	-	157,04
d. Rusak Berat	-	-	104,17	-	104,17
<b>Jumlah</b>	-	-	<b>851,56</b>	-	<b>851,56</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Ditinjau dari permukaan jalannya, sebagian besar jalan di Kota Palu berupa jalan aspal (75 persen). Sedangkan jalan kerikil dan jalan tanah masing-masing sekitar 4 persen dan 13 persen. Adapun sisanya sebesar 9 persen masih berupa jalan yang tidak dirinci.

Tabel 8. Panjang Jalan menurut Status Jalan Tahun 2016

Jenis Permukaan	Status Jalan				Jumlah
	Negara	Provinsi	Kota	Non Status	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Diaspal	-	-	539,33	-	539,33
b. Kerikil	-	-	26,15	-	26,15
c. Tanah	-	-	189,38	-	189,38
d. Tidak dirinci	-	-	96,70	-	96,70
<b>Jumlah</b>	-	-	<b>851,56</b>	-	<b>851,56</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Selain data panjang jalan, salah satu sarana penting dari subsektor angkutan darat adalah kendaraan bermotor. Perkembangan yang terjadi pada jumlah kendaraan bermotor secara langsung memberikan gambaran mengenai kondisi subsektor angkutan darat. Jumlah kendaraan bermotor cenderung meningkat, merupakan indikasi semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi.

Tabel 9. Jumlah Kendaraan Wajib Uji menurut Jenisnya, 2014-2016

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mobil Penumpang Umum	122	79	63
2. Mobil Bus Umum	768	674	432
3. Mobil Bus bukan Umum	-	-	-
4. Mobil Barang Umum	1 182	2 339	1 431
5. Mobil Barang bukan Umum	988	1 220	558
6. Kendaraan Khusus Umum	-	-	-
7. Kendaraan Khusus bukan Umum	-	-	-
8. Kereta Gandeng Umum	-	-	-
9. Kereta Gandeng bukan Umum	52	53	1
10. Kendaraan Bermotor	-	-	-
11. Sepeda Motor	-	23	46
<b>Jumlah</b>	<b>3 822</b>	<b>4 388</b>	<b>2 531</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Tabel 10. Arus Lalu Lintas Pesawat Udara dan Penumpang di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, 2011-2015

Tahun	Pesawat (buah)		Penumpang (orang)		
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Transit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	3 751	3 751	442 426	449 021	24 761
2013	4 338	4 338	498 996	498 452	22 778
2014	3 879	3 879	498 198	505 621	6 486
2015	4 142	4 142	500 668	500 670	6 349
2016	5 880	5 880	661 940	667 821	16 284

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

### 3.2. Komunikasi

Telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam era teknologi informasi masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Sampai tahun 2015, jumlah pelanggan telepon di Kota Palu tercatat sebanyak 21.689 pelanggan yang terbagi dalam 4 sentral Telepon, yaitu STO 1 wilayah Palu Timur, STO 2 Wilayah Palu Selatan, STO 3 Wilayah Palu Barat, dan Sentral Tawaeli.

Tabel 11. Banyaknya Pelanggan dan Sarana Telekomunikasi menurut STO dan Jenis Penggunaan Tahun 2015

STO	RT/Sosial/ Usaha	Telepon Umum	Wartel
(1)	(2)	(3)	(4)
1. STO 1/Palu Timur	14 094	-	-
2. STO 1/Palu Selatan	5 556	-	-
3. STO 1/Palu Barat	1 455	-	-
4. Sentral Tawaeli	584	-	-

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

### 3.3. Pariwisata

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan peloncong lainnya. Klasifikasi usaha akomodasi merupakan standar usaha hotel yang dirumuskan pada klasifikasi usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.

Dengan perkembangan dan kemajuan hotel sekarang ini, fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap atau istirahat bagi para tamu namun fungsinya bertambah sebagai tujuan konferensi seminar, lokakarya,

musyawarah dan kegiatan semacam yang tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap.

Dengan demikian, fungsi hotel sebagai sarana komersial berfungsi bukan hanya untuk menginap, istirahat, makan dan minum tetapi juga sebagai tempat melangsungkan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tujuan pendirian hotel tersebut.

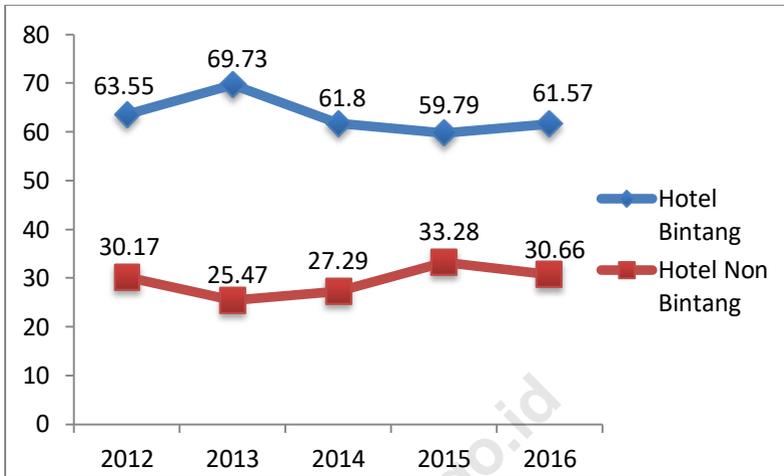
Kota Palu yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat bisnis yang ada di wilayah Kota Palu sehingga memicu berdirinya usaha jasa akomodasi atau hotel. Usaha akomodasi berkembang pesat terutama di wilayah pusat-pusat di Kota Palu, seperti di Kecamatan Palu Barat, Palu Timur, dan Palu Selatan.

Tabel 12. Banyaknya Hotel Bintang dan Akomodasi Lain di Kota Palu, 2012-2015

Tahun	Hotel Bintang		Hotel Nonbintang		Jumlah Tenaga Kerja
	Unit	Kamar	Unit	Kamar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2012	4	341	64	1 085	877
2013	5	453	69	1 331	1 015
2014	6	851	73	1 424	1 158
2015	6	982	76	1 532	1 242

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel berbintang mengalami peningkatan dari 59,79 persen pada tahun 2015 menjadi 61, 57 persen pada tahun 2016. Sementara itu, tingkat hunian kamar pada hotel non bintang/akomodasi lainnya mengalami penurunan 2,62 persen. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 6. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel dan Akomodasi di Kota Palu, 2012-2016

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Jumlah tamu asing yang datang pada hotel berbintang pada tahun 2016 sebanyak 3.189 wisatawan. Terjadi lonjakan tamu asing yaitu sebanyak 1.417 wisatawan pada bulan Maret 2016 dikarenakan terjadi peristiwa gerhana matahari total yang banyak menarik minat wisatawan. Sementara itu, tamu dalam negeri pada tahun 2016 berjumlah 328.22 pengunjung, dimana sekitar 12,26 persen memadati di bulan November 2016.

Tabel 13. Banyaknya Tamu Asing dan Tamu Dalam Negeri yang Menginap di Hotel dan Usaha Akomodasi, Januari-Desember 2016

<b>Bulan</b>	<b>Tamu Asing</b>	<b>Tamu Dalam Negeri</b>
(1)	(2)	(3)
1. Januari	84	18 532
2. Februari	124	21 352
3. Maret	1 417	30 207
4. April	230	2 634
5. Mei	145	32 729
6. Juni	97	20 584
7. Juli	157	24 222
8. Agustus	202	26 774
9. September	164	26 378
10. Oktober	185	29 493
11. November	205	40 246
12. Desember	179	31 271
<b>Jumlah</b>	<b>3 189</b>	<b>328 222</b>

<https://palukota.bps.go.id>

## **BAB IV**

### **PDRB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

#### **4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu**

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dari dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini juga bermanfaat untuk mengetahui dan menilai pembangunan yang telah dicapai serta untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini memberikan gambaran totalitas nilai tambah yang tercipta dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Perekonomian Kota Palu yang dicapai cenderung melambat dalam periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi (ADHK 2010) sebesar 8,81 persen, sempat melejit mencapai 9,30 persen pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Palu melambat berturut-

turut menjadi 8,06 persen; 7,84 persen; dan 6,12 persen. Sedangkan untuk besaran PDRB harga berlaku pada selalu mengalami peningkatan dari 11.522 miliar rupiah di tahun 2012 menjadi 18.660 miliar rupiah di tahun 2016.

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2016 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2015	2016
(1)		(2)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	721 158	792 752
B	Pertambangan dan Penggalian	1 096 039	1 230 844
C	Industri Pengolahan	1 407 995	1 494 946
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19 492	21 764
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51 069	54 524
F	Konstruksi	2 925 694	2 998 054
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 648 960	1 862 934
H	Transportasi dan Pergudangan	1 580 694	1 734 991
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187 540	208 251
J	Informasi dan Komunikasi	1 448 432	1 581 367
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	970 850	1 140 013
L	Real Estate	439 543	475 582

M, N	Jasa Perusahaan	198 098	221 494
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 358 576	2 563 798
P	Jasa Pendidikan	1 470 391	1 558 759
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	490 436	535 719
RS TU	Jasa lainnya	164 051	183 862
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>17 179 020</b>	<b>18 659 652</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Besaran Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar 18.660 miliar rupiah. Nilai ini meningkat 8,62 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, besaran PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13.915 miliar rupiah atau meningkat 6,12 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 15. Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Persen)

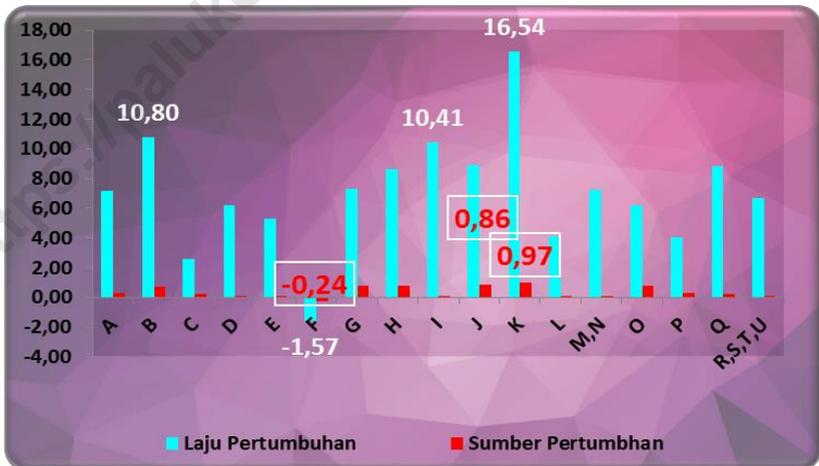
	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,81	4,58	4,29	4,20	4,25
B	Pertambangan dan Penggalian	5,67	5,67	5,96	6,38	6,60
C	Industri Pengolahan	9,45	9,02	8,63	8,20	8,01

D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,14	0,11	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,32	0,31	0,30	0,29
F	Konstruksi	15,37	16,08	16,63	17,03	16,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,23	9,69	9,54	9,60	9,98
H	Transportasi dan Pergudangan	9,27	9,39	9,33	9,20	9,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,93	1,04	1,09	1,12
J	Informasi dan Komunikasi	8,72	8,41	8,30	8,43	8,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,51	6,39	6,04	5,65	6,11
L	Real Estate	2,64	2,55	2,60	2,56	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	1,17	1,16	1,18	1,15	1,19
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,73	13,48	13,80	13,73	13,74
P	Jasa Pendidikan	8,28	8,56	8,47	8,56	8,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,73	2,70	2,79	2,85	2,87
RST U	Jasa lainnya	1,04	0,93	0,95	0,95	0,99
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, 2017

#### 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu

Laju pertumbuhan PDRB Kota Palu Tahun 2015 mencapai 7,84 persen, sedangkan pada Tahun 2016 melambat menjadi 6,12 persen. Secara umum, kondisi ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor ekonomi strategis dibanding periode sebelumnya. Dari total pertumbuhan PDRB Kota Palu Tahun 2016 sebesar 6,12 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi (K) memberi sumbangan terbesar terhadap total pertumbuhan PDRB yakni 0,97 persen, kemudian diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,86 persen.



Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2017

Bila ditinjau masing-masing sektor ekonomi, pada Tahun 2016 setiap sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor konstruksi, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor jasa keuangan dan asuransi (K) sebesar 16,54 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian (B) sebesar 10,80 persen, kemudian diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (I) sebesar 10,41 persen. Sedangkan sektor konstruksi (F) tumbuh negatif sebesar -1,57 persen. Pertumbuhan sektor konstruksi yang negatif sangat mempengaruhi agregat pertumbuhan PDRB Kota Palu mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu sektor dengan *share* terbesar.

# DATA

*Mencerdaskan Bangsa*



**Badan Pusat Statistik Kota Palu**

Jl. Baruga No 19, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Telp (62-451) 422066, Fax (62-451) 421266, Email:bps7271@bps.go.id